



EVALUASI PROSES KEBIJAKAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERKOTAAN DI KELURAHAN GENUKSARI KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG

Eryal Adhien Ahsani
(eryalahsani70@gmail.com)
Dr. Reni Windiani, M.S
Drs. Priyatno Harsato, M.A

ABSTRACT

This research aims to gain an overview and explanation of how the implementation and the role of BKM Mandiri PNPM Urban in community empowerment in Sub Genuksari Genuk District of the city, as well as any factors that may affect the implementation of community empowerment through the PNPM Urban . This type of research is descriptive qualitative , which is a type of research that can provide a factual overview of the implementation of community development programs to activities that include social , environmental , and revolving funds . Data collection is done by means of interviews , documentation and observation .

In the face of obstacles that exist in the implementation , and village governments are working to resolve the BKM Self as much as possible . Barriers such as lack of budget allocation to improve performance , the concept of development is slow , and the lack of human resources community . For the problem of budget allocation , manager of BKM Mandiri has worked hard to generate profits through the revolving loan funds that flow from the city government can also be optimized . In addition BKM Mandiri also trying to approach the private sector to invest in order to create a good relationship between the government and the private sector in order to achieve public goals through the Public Private Partnership good . As for the lack of information received by the public , BKM Mandiri seeks to conduct coaching and training more intensively in order to improve the quality of human resources KSM .

In the management of PNPM MP assessed no political factors that affect the performance of BKM Mandiri itself. In the management of PNPM MP preferred aspect is the aspect of profit (profit- oriented) to reduce poverty rather than political aspects .

Keyword : Evaluation, Policy, PNPM MP

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dan penjelasan tentang bagaimana pelaksanaan serta peran BKM Mandiri pada PNPM Mandiri Perkotaan dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Genuksari Kecamatan Genuk Kota Semarang,

serta faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui PNPM Mandiri Perkotaan tersebut. Tipe penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, yang merupakan tipe penelitian yang dapat memberikan gambaran faktual mengenai Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat terhadap kegiatan yang meliputi sosial, lingkungan, dan dana bergulir. Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Dalam menghadapi hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaan , pemerintah kelurahan dan BKM Mandiri berupaya mengatasinya dengan semaksimal mungkin. Hambatan tersebut seperti kurangnya alokasi anggaran untuk meningkatkan kinerja, konsep pengembangan yang lamban, dan minimnya sumber daya manusia masyarakat. Untuk masalah alokasi anggaran, pengelola BKM Mandiri sudah bekerja keras untuk menghasilkan laba melalui pinjaman bergulir dengan begitu aliran dana dari pemerintah Kota juga dapat dioptimalkan. Selain itu BKM Mandiri juga berusaha menggandeng pihak swasta untuk berinvestasi agar tercipta hubungan yang baik antara pemerintah dan swasta dalam rangka mencapai tujuan publik melalui Public Private Partnership yang baik. Sedangkan untuk minimnya informasi yang diperoleh masyarakat, BKM Mandiri berupaya mengadakan pembinaan dan pelatihan secara lebih intensif agar dapat meningkatkan kualitas SDM KSM.

Dalam pengelolaan PNPM MP dinilai tidak ada faktor politis yang mempengaruhi kinerja BKM Mandiri itu sendiri. Dalam pengelolaan PNPM MP aspek yang diutamakan adalah aspek keuntungan (profit oriented) untuk menekan angka kemiskinan dibanding aspek politis.

Kata Kunci : Evaluasi, Kebijakan, PNPM MP

PENDAHULUAN

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM sebagai payung kebijakan dari berbagai program penanggulangan kemiskinan di Indonesia, diharapkan mampu mengangkat kehidupan masyarakat ke taraf hidup yang lebih layak. Masyarakat merumuskan sendiri masalah yang terjadi dilingkungannya merupakan suatu upaya yang tidak mudah mengingat berbagai keterbatasan yang dimilikinya, sehingga masih membutuhkan peran serta dari pihak luar sebagai fasilitasi dalam penilaian kebutuhan tersebut. Dengan adanya proses fasilitasi tersebut diharapkan terjadi proses pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat. Dengan proses pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat ini diharapkan terjadi transfer ilmu dan pengalaman dalam mengatasi permasalahan yang ada dan nantinya masyarakat dapat secara mandiri mengatasi permasalahan yang terjadi dengan kemampuan, kekuatan dan potensi yang dimilikinya. Badan Keswadayaan Masyarakat.

Seiring dengan pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, Kelurahan Genuksari merupakan salah satu yang menjadi target dari PNPM Mandiri Perkotaan PNPM MP/P2KP, yang terletak di Kecamatan Genuk Kota Semarang, Jawa Tengah. Dalam sejarah PNPM mandiri perkotaan yang dulunya disebut P2KP, di Kota Semarang dari 177 Kelurahan terdapat 4 Kelurahan dengan dana BLM pemberdayaan terbesar dan Kelurahan Genuksari adalah salah satunya dengan dana BLM tahun 2009 berkisar 350 juta, tahun 2010 juga 350 juta dan tahun 2011 mencapai 405 Juta lalu pada tahun 2012 kembali lagi pada 350 juta, sedangkan untuk tahun 2013 dana BLM

tiap kelurahan di Semarang sudah mulai merata dan kelurahan Genuksari mendapat 75 juta.

BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) adalah sebuah lembaga yang menjadi milik masyarakat kelurahan sehingga seluruh warga berhak terlibat dalam program yang dimotori oleh BKM, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengawasan/monitoring dan evaluasi. Oleh karena itulah lembaga BKM harus muncul di masyarakat sebagai suatu kebutuhan.

Hasil perumusan masalah yang terjadi di masyarakat dijadikan sebagai bahan utama dalam penyusunan suatu program penanggulangan kemiskinan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) sebagai representasi nilai – nilai luhur yang mendasari pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di tingkat kelurahan. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) sebagai wadah dari masyarakat dengan kepemimpinan kolektif ini diharapkan dapat menjadi lokomotif dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di wilayahnya.

Seiring perjalanan program pemberdayaan penanggulangan kemiskinan kelurahan Genuksari mendapat anggaran dana pertama pada tahun 2000 lalu kemudian terhenti dan baru mendapat dana BLM mulai tahun 2009. Untuk PNPM tahun 2009-2011 kelurahan Genuksari tidak boleh mendapati kegiatan untuk bidang ekonomi yang hanya boleh bergerak untuk pengembangan bidang sosial dan lingkungan yang dikarenakan kredit macet dari program P2KP tahun 2000.

Hal ini menjadi menarik untuk dikaji sebagai penelitian guna memperoleh kebenaran sesungguhnya. Berdasarkan dari uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti peran Badan Keswadayaan Masyarakat dalam upaya optimalisasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP) di Kelurahan Genuksari.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.

Evaluasi kebijakan merupakan kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan/program dan sejauh mana kebijakan/program tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi dijalankan untuk mengetahui outcome dan dampak dari kebijakan yang telah ditetapkan selama dalam kurun waktu tertentu untuk kepentingan bersama.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/ meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya

Badan Keswadayaan Masyarakat adalah organisasi yang dibentuk dari musyawarah dan rebug warga masyarakat setempat sebagai wadah untuk perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan dari Program Nasional Pembardayaan Masyarakat Perkotaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dan melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian

pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Menurut Bogdan dan Taylor dalam (Moleong, 2007), metodologi kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Penelitian ini akan melihat bagaimana peran BKM Mandiri Genuksari dan menganalisa implementasi dari kebijakan PNPM Mandiri Perkotaan Kelurahan Genuksari. laporan penelitian ini berisikan kutipan-kutipan data untuk memberikan suatu gambaran dari penyajian laporan. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, dokumentasi, serta studi pustaka. Pertanyaan yang diajukan melalui wawancara dilakukan kepada pengurus PNPM MP tingkat Kelurahan yaitu ketua BKM dan Lurah Genuksari. Sumber data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dari hasil wawancara dengan Lurah, Pengurus BKM, dan KSM, kemudian data sekunder diperoleh dari kajian pustaka, arsip serta data-data yang diperoleh dari Kelurahan maupun BKM Mandiri Genuksari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertama, Kecocokan. Kebijakan PNPM MP Genuksari dalam penerapannya sesuai dengan keadaan yang tengah berkembang di masyarakat Kota Semarang dan sekitarnya karena potensi yang ada dan prospek ke depan yang cukup baik. Kebijakan pendirian PNPM ini perlu dipertahankan kedepannya karena keberadaan BKM ini dibutuhkan oleh masyarakat. Namun dalam pengelolaannya BKM juga harus mampu berkembang mengikuti perkembangan teknologi dan berusaha memenuhi tuntutan masyarakat. Tidak diperlukannya program pengganti disebabkan karena tidak adanya kerugian dari pelaksanaan program. Masyarakat juga merasa membutuhkan keberlanjutan program ini untuk kedepannya namun harus ada evaluasi serta restrukturisasi konsep pengelolaannya sehingga akan memiliki konsep pengelolaan yang jelas dengan begitu tujuan yang ditetapkan dapat tercapai.

Kedua, Efektifitas. Dari hasil dan dan dampak yang diharapkan dalam pelaksanaan program ini belum mampu terwujud dengan baik. Seperti masih belum produktifnya KSM dan masih rendahnya kesadaran debitur akan angsuran. Hasil dan dampak dari pelaksanaan program menunjukkan bahwa BKM masih belum mampu memberdayakan masyarakat hal ini terlihat dari jalanan rusak dan produktifitas KSM yang masih kurang maksimal. Dari sisi peningkatan ekonomi, BKM yang menanamkan modal di ekonomi bergulir juga belum tercapai dengan baik karena terkendala regulasi dan kesadaran KSM akan angsuran kredit masih kurang.

Ketiga, Efisiensi. Keberadaan dana pendukung pelaksanaan program sangat minim sehingga mempengaruhi dalam pelaksanaan, pemeliharaan dan sosialisasi yang harus dilakukan BKM. Pihak-pihak yang terlibat dalam program ini adalah pihak-pihak terkait yang menguasai dan kompeten dalam bermusyawarah dan bermasyarakat. Disini peran BKM sebagai pelaksana program sangat dituntut demi tercapainya tujuan dari pelaksanaan program. Lurah dan masyarakat juga harus mendukung tercapainya tujuan program. Pemerintah Kelurahan dan BKM melakukan proses secara bertahap dan berkala untuk menyukseskan program. Seperti pengembangan dan pembangunan infrastruktur dan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat untuk mencapai tujuan

program. Peraturan mengenai pelaksanaan program ini mengacu pada kebijakan pemerintah pusat yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Walikota. Hal ini menunjukkan adanya upaya yang baik dari pemerintah untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat serta optimalisasi potensi masyarakat yang ada untuk mencapai kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat

Keempat, Kecukupan. Tujuan dari program ini adalah terwujudnya masyarakat yang mandiri, berdaya dan mahdani, yang mampu mengatasi persoalan kemiskinan di wilayahnyadalam menerapkan model pembangunan partisipatif yang berbasis kelembagaan masyarakat serta pendekatan kemitraan masyarakat dengan pemerintah dan kelompok peduli setempat. Pelaksanaan tujuan telah diupayakan dengan baik oleh BKM sebagai pelaksana. Walaupun secara keseluruhan belum tercapai secara maksimal. Dalam usaha pencapaian tujuan program dalam pelaksanaannya, tujuan tersebut melalui pemerintah telah mampu mengatasi masalah yang ada dengan cukup baik sehingga pelaksanaan program bisa tetap terus berjalan dan mampu mencapai tujuan yang diharapkan.

Kelima, Ketepatan. Dalam pelaksanaan program ini telah memberikan manfaat kepada masyarakat dengan kesempatan masyarakat untuk terjun langsung dalam pembangunan serta memberikan modal untuk menjalankan usaha. Melalui evaluasi atas operasional periode 2012-2013 ini secara terstruktur pemerintah telah membuat arah penggunaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan program. Dengan adanya arah kedepannya ini akan dapat diketahui bagaimana program kedepannya akan dibangun dan dilaksanakan untuk mencapai tujuannya. Hambatan – hambatan yang terjadi dalam penggunaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban ini lebih cenderung pada terbatasnya sumber daya BKM dan KSM untuk pengembangan dan pembangunan infrastruktur, masih lemahnya sinergi antar lembaga terkait, dan regulasi yang berbelit.

PENUTUP

KESIMPULAN

Kebijakan pemerintah untuk menerapkan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan (PNPM MP) di Kelurahan Genuksari Kota Semarang secara konseptual merupakan pilihan yang cukup tepat meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mandiri terbilang cukup bagus untuk mendukung peningkatan kemandirian masyarakat ke depannya meskipun sejauh ini belum ada kontribusi optimal yang terlihat kepada penanggulangan kemiskinan masyarakat Genuksari melalui sektor lingkungan, sosial, dan ekonomi yang tertuang dalam pemberdayaan masyarakat. Sejauh ini setelah berjalannya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP) selama hampir 6 periode di mulai dari tahun 2000, 2009-sekarang dari sisi pemberdayaan masyarakat dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di area Kelurahan Genuksari, BKM cukup mampu memberikan manfaat yang bagus kepada masyarakat dengan memberikan alternatif pemberdayaan masyarakat dengan basis kelembagaan dan organisasi berkelompok . Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan (PNPM MP) ini berjalan cukup

baik meskipun harus ada pembenahan kedepannya sehingga dapat lebih bermanfaat untuk masyarakat dan pemerintah.

Dalam pelaksanaan operasional Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mandiri masih harus berusaha lebih keras untuk mencapai tujuannya, hal ini disebabkan oleh minimnya perhatian pemerintah Kelurahan dan Fasilitator dalam usaha pengembangan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) meskipun pada waktunya hal tersebut merupakan program dari pemerintah pusat. Selain itu adanya keterbatasan dana juga mempengaruhi upaya optimalisasi usaha KSM. Alokasi anggaran pemerintah pusat melalui APBN dan pemerintah daerah melalui APBD hanya dikucurkan pada saat pemberian modal awal saja sedangkan untuk operasional, BKM Mandiri seolah-olah berjuang sendirian.

Dari sisi manajerial, BKM Mandiri bersama jajaran kelembagaan masyarakat terus berbenah sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih baik, transparan dan akuntabel. Pihak pengelola PNPM MP terus berusaha melakukan promosi mengenai potensi dan prospek PNPM MP agar mampu berkembang dengan lebih baik. Optimalisasi pelayanan mutlak diperlukan karena hal tersebut akan membuat PNPM MP lebih kompetitif dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan layanan yang baik kepada masyarakat dan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pinjaman bergulir yang diperoleh dari BLM.

Kemudian adanya dukungan dan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat, fasilitator, dan kalangan legislatif ini menjadi sebuah dorongan yang sangat kuat untuk BKM Mandiri dalam mewujudkan tujuan PNPM MP sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan PNPM MP dengan meminimalisir hambatan-hambatan yang ada secara baik dan tepat. Dalam menghadapi hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaan, pemerintah BKM Mandiri berupaya mengatasinya dengan semaksimal mungkin. Hambatan tersebut seperti kurangnya alokasi anggaran untuk meningkatkan kinerja, konsep pengembangan yang lamban, dan minimnya sumber daya manusia masyarakat.

Untuk masalah alokasi anggaran, pengelola BKM Mandiri sudah bekerja keras untuk menghasilkan laba melalui pinjaman bergulir dengan begitu aliran dana dari pemerintah Kota juga dapat dioptimalkan. Selain itu BKM Mandiri juga berusaha menggandeng pihak swasta untuk berinvestasi agar tercipta hubungan yang baik antara pemerintah dan swasta dalam rangka mencapai tujuan publik melalui Public Private Partnership yang baik. Sedangkan untuk minimnya informasi yang diperoleh masyarakat, BKM Mandiri berupaya mengadakan pembinaan dan pelatihan secara lebih intensif agar dapat meningkatkan kualitas SDM KSM.

Dalam pengelolaan PNPM MP dinilai tidak ada faktor politis yang mempengaruhi kinerja BKM Mandiri itu sendiri. Dalam pengelolaan PNPM MP aspek yang diutamakan adalah aspek keuntungan (profit oriented) dibanding aspek politis. Mengenai keberlanjutan PNPM MP ini menurut Lurah dan masyarakat masih dibutuhkan karena mengingat adanya manfaat dan nilai kepuasan dari masyarakat atas pelaksanaan operasional PNPM MP ini. Dari pendapat Pemerintah maupun DPRD, PNPM MP Kelurahan Genuksari dipandang masih banyak masyarakat miskin yang sebenarnya memiliki potensi dan prospek yang baik untuk dikembangkan.

SARAN

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) secara berkala harus mampu melakukan evaluasi atau melakukan jajak pendapat mengenai kualitas kinerja KSM ini kepada BKM, agar mengetahui bagaimana yang dirasakan dan diharapkan oleh PNPM MP. Selain itu untuk mengetahui kekurangan dan kelemahan operasional PNPM MP selama ini perlu pemetaan swadaya dan pengelompokan masyarakat miskin yang lebih akurat sehingga BKM dapat mengatasi hal tersebut di kelak kemudian hari agar kinerja PNPM MP berjalan dengan baik dan dapat berlanjut untuk periode–periode berikutnya. Selain itu melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja KSM baik dalam konteks manajerial, finansial, maupun social benefit bagimasyarakat.

Badan Keswadayaan Masyarkat sebaiknya melakukan pengamatan dengan lebih komprehensif terhadap potensi dan prospek bisnis masyarakat yang masih bisa dikembangkan yang mampu bersinergi dengan PNPM MP sehingga dapat menghasilkan profit dengan begitu diharapkan tidak terlalu membebani anggaran dengan menggunakan strategi pengembangan yang tepat dengan menggunakan strategi pengembangan melalui konsentrasi, penyesuaian dan diversifikasi. Misalnya BKM melakukan ekspansi maupun pengembangan bisnis dengan pihak investor dalam bidang budidaya perikanan yang berkualitas dan berdaya jual tinggi sehingga dapat membuka peluang pengembangan usaha dan pembangunan daerah.

Masyarakat juga kedepannya akan memberikan tuntutan–tuntutan kepada BKM yang harus bisa dipenuhi kedepannya karena adanya perkembangan secara dinamis kondisi sosial, politik, budaya dan ekonomi. Maka dengan operasional PNPM MP ini diharapkan ada ketepatan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik yang semakin kompleks dan menuntut hasil yang baik. BKM juga harus dengan cepat dan tanggap dalam mengatasi tuntutan tersebut dengan pemecahan masalah yang tepat pula agar PNPM MP Kelurahan genuksari dapat terus dikembangkan dan berlanjut dengan lebih baik sehingga mampu menekan angka kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Badjuri, Abdulkahar dan Teguh Yuwono. 2002. *Kebijakan Publik: Konsep dan Strategi*. Semarang: Undip Press.
- Dunn, William N 2003. *Analisa kebijaksanaan Publik*. Yogyakarta: Hanindita.
- Indiahono, Dwiyanto. (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kaho, Josef Riwu. 2007. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kartasmita Ginandjar, 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta : CIDES.
- Kartasmita, Ginandjar. 1997. *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat*, Surabaya : CIDES.
- Kunarjo, 1996. *Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Kuncoro, Mudrajad, 2004, *Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*, Jakarta : Erlangga.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta : Andi offset.
- Moleong, Lexy J. 1999. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, D, Riant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Payaman Simanjuntak. *Manajemen dan evaluasi kinerja*. Jakarta : Lembaga penerbit UI.
- Risyanti, Riza dan Roesmidi. 2006. *Pemberdayaan Masyarakat*. Jatingor: Alqaprint
- Sidik, Machfud. 2004. *Dana alokasi umum: konsep, hambatan, dan prospek di era otonomi daerah*. Jakarta : Kompas.
- Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Pressindo.
- Winarno, budi. 2008. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, Jakarta: Media Pressindo (edisi revisi)

DOKUMEN

- Laporan Pertanggung Jawaban BKM Mandiri Kelurahan Genuksari pada Rembug Warga tahunan (RWT) Tahun Buku 2013
- Akta Notaris Ny. Tuti Wardhany S.H tanggal 22 maret Tahun 2000 No.44 yang menjadi Anggaran dasar Badan Keswadayaan Masyarakat Kelurahan Genuksari

JURNAL

Kementrian Pekerja Umum Direktorat Jendral Cipta Karya. 2010. *Tentang Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan.*

Koordinator Tim Inti.2009. *Perencanaan Partisipasif PJM Pronangkis Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan.*

Mubarak, Zaki,2010.Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau dari Proses Pengembangan Kapasitas Pada Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Sastrodirjan Kabupaten Pekalongan, Tesis. Uiversitas Diponegoro:Semarang.

WEBSITE

Carter McNamara dalam *Basic Guide To Program Evaluation* diunduh dari [http://www.tgci.com/magazine/A Basic Guide to Program Evaluation.pdf](http://www.tgci.com/magazine/A%20Basic%20Guide%20to%20Program%20Evaluation.pdf) diakses pada tanggal 23 february 2013 pukul 12:45 WIB

<http://www.p2kp.org/pengaduandetil> di akses pada tanggal 2 february 2014 pukul 13.00 WIB